

# *IPERKA: Dapur ....*

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

"Jika proses pelaksanaannya tidak diawasi oleh masyarakat khususnya mengenai data jumlah produksi dan penerima bantuan tentunya celah korupsi bisa saja terjadi. Sehingga tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang berhak tapi tidak mendapatkannya," ujar Ketua Asosiasi IPERKA, Didin Syabaruddin, saat mengunjungi kantor KBE, Rabu (6/5). Menurutnya, dapur umum akan lebih realistis jika didirikan untuk korban bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan lainnya. Pasalnya, korban yang terdampak jumlahnya real sehingga pendistribusian lebih jelas dan tepat sasaran.

"Akan lebih efektif jika

pemerintah bekerjasama dengan pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) atau pedagang kaki lima dengan terlebih dulu didata secara transparan jumlah masyarakat yang berhak menerima. Dengan begitu kemungkinan untuk terjadi korupsi lebih kecil, dan pelaku UMKM akan terbantu usahanya," ucapnya.

Selain menyoroti dapur umum, Didin mengkritisi terkait penutupan akses jalan di wilayah perkotaan seperti di Tuparev, sosialisasi PSBB yang dinilai kurang maksimal sehingga masih banyak yang belum mematuhi, dan adanya aturan PSBB yang dinilainya tidak masuk logika.

"Jika memang masih banyak

toko di luar kebutuhan pokok yang buka saat PSBB kenapa tidak langsung saja datangi tokonya, karena dengan menutup akses jalan tentunya sangat merugikan masyarakat yang beraktivitas dalam artian mencari kebutuhan pokok," katanya.

"Untuk PSBB khususnya pembatasan kendaraan pribadi saya rasa tidak masuk secara logika. Yang mana sepeda motor bisa berboncengan dengan alamat identitas yang sama, sedangkan mobil hanya boleh satu orang di depan, jika memang pengendara mobil memiliki identitas yang sama dengan penumpangnya kenapa tidak duduk di depan saja, karena meski di batasi saat berada di mobil mereka akan tetap melakukan kontak secara langsung saat di rumah," tambahnya. (ayi)